



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WITARSO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 844668

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 330.598.000**

1. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 23.616.000
2. Tanah Seluas 881 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 23.787.000
3. Tanah Seluas 323 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 11.628.000
4. Tanah Seluas 498 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 17.989.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2377 m2/100 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 159.278.000
6. Tanah Seluas 2304 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 14.300.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/36 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 79.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI  
Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
14.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 61.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	194.036.919
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	664.634.919
III. HUTANG	Rp.	143.296.082
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	521.338.837

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.